



KR GROUP

<http://www.krijoga.com>

Jurnal Baitan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE

JUMAT KLWON

3 FEBRUARI 2023 (12 REJEB 1956 / TAHUN LXXVIII NO 126)

HARGA RP 4.000 / 20 HALAMAN



Analisis Kepariwisatahan & Kemiskinan

Dr Ike Janita Dewi

DAERAH Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan budaya, sejarah dan alam yang menjadikannya daerah tujuan wisata yang populer. DIY sebagai pusat pendidikan juga menjadikannya kunjungan wisata edukasi yang mungkin terbesar di Indonesia. Tidak heran jika kepariwisatahan menjadi salah satu pilar terpenting dalam pembangunan DIY. Pariwisata memberikan sumbangan yang signifikan pada perekonomian DIY. Jika diukur dari lapangan usaha akomodasi dan makan-minum, maka sumbangan pariwisata berkisar 10,4%. Pariwisata menghasilkan dampak penganda yang luas, sehingga secara keseluruhan pariwisata bisa menghasilkan dampak sampai dengan 25% (Bank

* Bersambung hal 7 kol 1

Kepariwisatahan

Indonesia, 2020). Saat pandemi, perekonomian DIY juga menurun saat mobilisasi wisatawan terhenti. Akan tetapi, yang menjadi topik diskusi harga di DIY belakangan ini adalah tingkat kemiskinan di DIY yang relatif tinggi. Pertanyaannya, apakah pilihan DIY untuk mengembangkan kepariwisatahan adalah pilihan yang tepat? Apakah pariwisata bisa memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan? Mengapa DIY yang bisa menarik wisatawan dalam jumlah besar ternyata tetap menyisakan penduduk miskin dengan jumlah yang relatif banyak?
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan (contohnya: Pham & Riedel, 2019), sektor jasa (yang juga meliputi pariwisata) memang dianggap sebagai sektor yang paling sedikit berdampak pada pengentasan kemiskinan. Dibanding sektor pertanian dan industri, sektor jasa membutuhkan tenaga kerja yang lebih terampil sehingga lebih sulit diakses penduduk miskin yang biasanya tidak memiliki keterampilan khusus. Lebih lagi, industri pariwisata dengan standar kualitas tertentu banyak menyerap konten produk impor. Akibatnya, kebocoran ekonomi terjadi. Hasil tersebut didasarkan pada gambaran industri pariwisata yang formal dan relatif terstandarisasi.

Sambungan hal 1

Kepariwisatahan yang bisa menghasilkan dampak pada pengentasan kemiskinan harus bisa menyerap rantai pasok lokal dan sumber daya pariwisata yang tidak lalu membutuhkan keterampilan khusus. Strategi ini bisa dilaksanakan dengan membangun pariwisata berbasis masyarakat. Salah satu bentuknya adalah pengembangan desa wisata dan kampung wisata. Desa-kampung wisata menjadi upaya yang *bottom-up*, yang dipraktikasi, ditumbuhkan, dan dikelola oleh kelompok masyarakat lokal. Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata DIY, sekarang ini di DIY terdapat 205 desa dan kampung wisata aktif yang tergolong dalam desa wisata ini-san, berkembang, maju, dan mandiri.
Berdasarkan pendataan desa dan kampung wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata DIY di tahun 2022, lebih dari 75% dari SDM di Desa Wisata dan Kampung Wisata maksimal adalah lulusan SMA atau sederajat. Dari jumlah tersebut, sekitar 10% adalah lulusan SMP atau lebih rendah. Dengan latar belakang seperti ini, sebenarnya pengembangan kepariwisatahan DIY yang mengutamakan pengembangan kepariwisatahan berbasis masyarakat sudah *on the right track*. Beberapa desa wisata di DIY bahkan telah mendapat pengakuan internasional, seperti Desa Wisata

Nglangeran yang menjadi salah satu desa wisata terbaik dunia (UNWTO, 2021) dan Desa Wisata Perintis sebagai desa wisata terbaik di ASEAN (2021). Pemerintah bekerja sama dengan akademisi perlu mengembangkan sebuah sistem yang bisa melakukan penelusuran dampak pariwisata pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sebuah sistem informasi berbasis digital bisa dikembangkan di tingkat Kabupaten/Kelurahan. Salah satu contoh baik adalah sistem informasi yang dikembangkan di Kelurahan Peret, Kabupaten Bantul.
Kalurahan ini memiliki sistem informasi yang mendata seluruh penduduk termasuk identifikasi penduduk berdasarkan nama dan profil sosial ekonominya. Dengan sistem informasi ini, upaya pembangunan kepariwisatahan yang melibatkan masyarakat bisa dilakukan intervensi langsung pada penduduk miskin. Dengan sistem informasi seperti ini, bukan hanya pembangunan kepariwisatahan, upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan tepat sasaran *by name by address*.
(Penulis adalah Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Juni Lomba Desa Wisata dan Pokdarwis DIY)-d